



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BONE
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. ANDI ISLAMUDDIN
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 466210

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/264 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 912 m2 di KAB / KOTA BONE, WARISAN Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/80 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/80 m2 di KAB / KOTA BONE, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 228.600.000**

1. MOTOR, HONDA C1C02N16M2 SCOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.100.000
2. MOTOR, YAMAHA B65-A B65-A Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000
3. MOBIL, HONDA GK5 1.5 RS CVT JAZZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 10.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	423.491.096
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.462.091.096
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.462.091.096

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.